

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Balai Latihan Kerja Padang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah wewenang Kementerian Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelatihan, Uji Kompetensi, Sertifikasi, dan Kerja Sama Kelembagaan di Bidang Pelatihan Kerja Industri. Dalam kegiatannya yang seiring dengan penambahan jumlah perusahaan atau instansi yang melakukan kerjasama, maka Balai Latihan Kerja Padang harus mengimbangi proses pelayanan dengan pesertanya melalui peningkatan layanan teknologi dan informasi yang digunakan.

BLK Padang sebagai lembaga yang memberikan pelatihan dalam proses penerimaan calon peserta dan pengelolaan data peserta pelatihan sudah menggunakan sistem informasi. Penerimaan calon peserta yang semakin meningkat setiap bulannya, sering mengakibatkan sistem yang *not responding* (sistem tidak merespon), sehingga menyebabkan proses pelayanan menggunakan sistem menjadi kurang efektif, sedangkan kecepatan dalam proses pelayanan adalah hal yang utama.

Pendaftaran sebagai calon peserta pelatihan, peserta harus tetap datang mendaftar langsung ke BLK Padang untuk mengisi formulir sebagai bahan bukti untuk mengikuti tes atau seleksi sebagai calon peserta pelatihan, karena sistem belum bisa menghasilkan bukti pendaftaran online. Calon peserta harus tetap antri

untuk mengisi formulir pendaftaran manual. Hal ini menyebabkan proses pelayanan sistem kurang efektif, karena akan semakin mempersulit calon peserta / pengguna sistem.

Setelah calon peserta mendaftar melalui sistem informasi yang ada, ketika dilihat daftar peserta yang sudah mendaftar masih banyak data yang salah, seperti adanya data yang sama dalam jurusan yang berbeda, namun sistem belum bisa mengatasi data yang sama tersebut, sehingga terjadi redundansi data, dan pegawai harus mengecek kembali data peserta yang sudah mendaftar dan mencocokkan dengan formulir yang manual.

Dengan adanya kerangkapan (redundansi) data mengakibatkan penyajian laporan data peserta mendaftar menjadi kurang optimal dan efektif. Sehingga informasi yang dihasilkan tidak benar dan petugas harus mengecek kembali data peserta mendaftar yang menyebabkan keterlambatan dalam menghasilkan laporan.

Penerimaan peserta pelatihan setiap bulannya selalu dibatasi sesuai dengan jurusan yang masih tersedia. Untuk penerimaan peserta pelatihan perjurusan setiap bulannya 12 peserta per kelas. Dengan adanya masalah redundansi data yang mengakibatkan keterlambatan dalam menghasilkan laporan, sehingga pimpinan sulit untuk memperoleh informasi yang benar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan analisa sistem untuk mengetahui kinerja sistem, kualitas informasi yang dihasilkan dan pengelolaan masalah yang ada pada sistem. Pengukuran terhadap sistem bertujuan untuk mengetahui kualitas dari kerja sistem tersebut, apakah kualitas sistem tersebut sudah efektif atau belum. Dengan menerapkan Framework Cobit dalam

menganalisa sistem diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem dan informasi yang dihasilkan, serta dapat membantu dalam mengatasi masalah – masalah yang terjadi.

COBIT (*Control Objectives for Information and Related Information*) adalah kerangka dari *best practices* manajemen TI yang membantu organisasi untuk memaksimalkan keuntungan bisnis dari organisasi TI. Dalam melakukan pengukuran kontrol keamanan Framework Cobit menyediakan standard pengujian terhadap manajemen teknologi informasi. yaitu dengan 4 domain framework Cobit dan 7 kriteria informasi (Haqiqi, Ramawati, & Harsadi, 2019).

Menyadari pentingnya penyempurnaan tata kerja bagi suatu instansi dalam melakukan pekerjaan, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi yang berjudul; “ **ANALISA PENGGUNAAN FRAMEWORK COBIT DALAM MENGUKUR KUALITAS SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA PESERTA PELATIHAN PADA BLK PADANG**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menyajikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa terhadap sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat meningkatkan proses pelayanan sistem?
2. Bagaimana analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna sistem?
3. Bagaimana analisa terhadap sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat mengurangi kerangkapan data?

4. Bagaimana dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat?
5. Bagaimanakah analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat membantu pimpinan dalam menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan?

1.3 Hipotesis

Dari perumusan masalah diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis, yaitu diharapkan :

1. Dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan menggunakan Framework Cobit diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan sistem lebih efektif.
2. Dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan menggunakan Framework Cobit diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna sistem dalam mengoperasikan sistem.
3. Dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan menggunakan Framework Cobit diharapkan dapat membantu mengurangi kerangkapan data peserta pelatihan.
4. Dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan menggunakan Framework Cobit diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan laporan data peserta pelatihan yang lebih akurat lagi.
5. Dengan analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan menggunakan Framework Cobit diharapkan dapat mempermudah pimpinan menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya masalah, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem yang dianalisa adalah kinerja sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan pada BLK Padang dengan menggunakan Framework Cobit.
2. Tidak membahas prosedur pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya analisa sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan sistem.
2. Dapat mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan pada BLK Padang.
3. Dapat menganalisa dan mengukur sejauh mana permasalahan dan kelemahan sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan pada BLK Padang.
4. Dapat meningkatkan kualitas sistem informasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisa dan mengukur kualitas sistem.

2. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisa sistem.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Balai Latihan Kerja Padang untuk dapat meningkatkan sistem penerimaan dan pengelolaan data peserta pelatihan.
4. Dapat Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.7 Tinjauan Umum Balai Latihan Kerja Padang

Organisasi merupakan wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap sistem informasi yang ada di Balai Latihan Kerja Padang. Balai Latihan Kerja (BLK) Padang merupakan lembaga pelatihan kerja industri.

1.7.1 Sejarah Singkat Balai Latihan Kerja Padang

Balai Latihan Kerja Padang adalah sebuah unit kerja dibawah kementerian ketenagakerjaan RI, yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan industri bagi calon sumber daya manusia (SDM) dengan spesialis dan kompetensi dibidang industri ketenagakerjaan. Dengan berbasis kompetensi, Balai Latihan Kerja Padang berlokasi di jln. Sungai Balang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada tahun 1969 dengan nama Pusat Latihan Kejuruan Industri (PLKI) Padang diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja Laksamana Mursalin yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kantor daerah tenaga kerja provinsi Sumatera Barat terletak di jalan Padang Baru no.81 Padang

Pada tahun 1982 (PLKI) Padang memperoleh bantuan peralatan dari ibrd dan pindah lokasi ke jln. Sungai Balang Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan dengan nama Balai Latihan Kerja Industry (BLKI) Padang oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, tahun 1986 berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang.

Pada tahun 1996 nama BLK Padang di ubah menjadi Balai Latihan Kerja Khusus Perdagangan (BLKKP). BLKKP Padang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 1 juli 2012 UPTD BLKKP Padang berubah nama menjadi UPTD Balai Latihan Kerja Industry (BLKI) Padang dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Melalui peraturan menteri ketenagakerjaan RI no 21 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kerja BLKI Padang, maka ditetapkan Balai Latihan Kerja Padang.

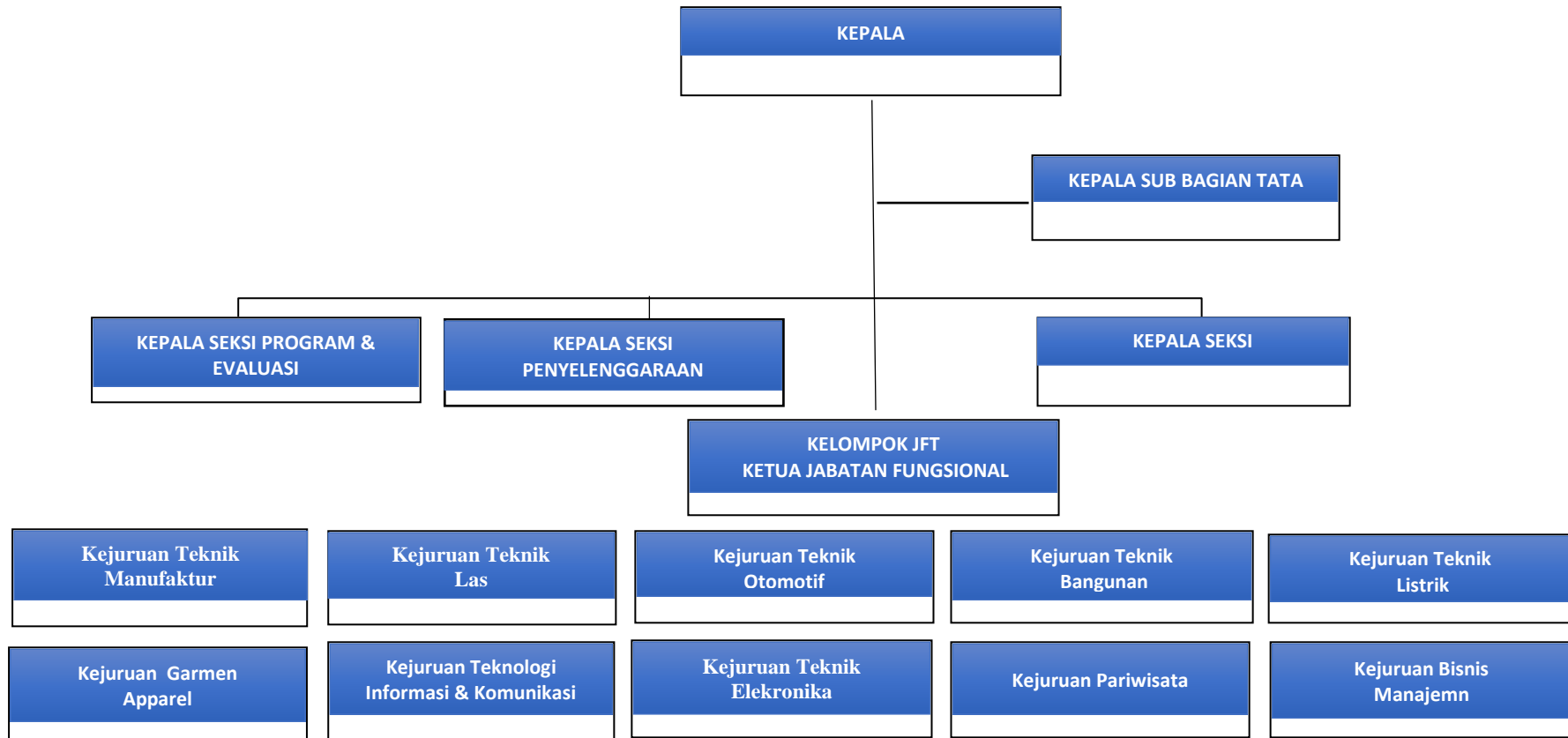
1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan. tentang struktur kerja organisasi dan hubungan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kerja. Berikut stuktur Balai Latihan Kerja Padang pada gambar 1.1 dibawah ini.



KEMNAKER

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**



Sumber : Balai Latihan Kerja Padang

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Padang

1.7.3 Uraian Tugas dan Fungsi Masing - Masing Bagian Organisasi

Sesuai dengan Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, masing-masing bagian pada BLK Padang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Padang

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Blk mempunyai tugas yaitu :

- a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Latihan Kerja (BLK) Padang sesuai dengan kebijakan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan Kejuruan teknologi dan informasi, teknik otomotif, bangunan, las, listrik dan aneka kejuruan lainnya.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam bentuk pelatihan dan penggunaan fasilitas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Penyusunan rencana dan program pelatihan, kerjasama dan penggunaan fasilitas
- 2) Pelaksanaan pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas
- 3) Pemasaran program pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas

4) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga, dan

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bagian Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BLK Padang.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Pemberdayaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pemberdayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Balai Latihan Kerja.

Sub Bagian Pemberdayaan mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyiapkan/melaksanakan rekrutmen, pelaksanaan pelatihan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan uji kompetensi
- b. Menyiapkan/melaksanakan rencana program pemberdayaan pelatihan dalam bidang perdagangan dan jasa
- c. Menyiapkan/melaksanakan pelatihan dan pelaporan kegiatan pelatihan dan fasilitas

- d. Menyiapkan/melaksanakan penyusunan dan penyajian penugasan instruktur sesuai dengan program UPTD Balai Latihan Kerja, dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas yang diberikan oleh pimpinan.
4. Sub Bagian Penyelenggaraan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Balai Latihan Kerja.

Sub Bagian Penyelenggaraan mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyiapkan/melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan pemberdayaan program fasilitas dan pengembangan pelatihan kompetensi
 - b. Menyiapkan/melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kompetensi, sistem serta metode pelatihan dan pemberdayaan/pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
 - c. Menyiapkan/melaksanakan penyusunan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan
 - d. Menyiapkan/melaksanakan standar pelatihan, program pelatihan, kurikulum, modul, buku kerja dan buku evaluasi, bahan serta metode pelatihan;
5. Sub Bagian Program

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Balai Latihan Kerja.

Sub Bagian Program mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyiapkan/melaksanakan kajian penyusunan dan pemasaran sistem informasi pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Menyiapkan/melaksanakan promosi, negosiasi pelatihan dibidang perdagangan dan jasa
 - c. Menyiapkan/melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pada lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta;
 - d. Menyiapkan/melaksanakan rencana program pemberdayaan pelatihan dalam bidang perdagangan dan jasa;
 - e. Menyiapkan/melaksanakan pemasaran dan informasi pelatihan serta pelaporan, dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas yang diberikan oleh pimpinan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Balai Latihan Kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan keterampilan sesuai dengan kejuruannya.